



**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**KONFLIK LOKAL  
PERCIKAN DISINTEGRASI NASIONAL:  
STUDI KASUS TAWURAN ANTARKAMPUNG  
DI KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH**

Oleh :  
Drs. Agus Maladi Irianto, MA  
Drs. Mudjahirin Thohir, MA  
Drs. Suharyo, M.Hum

---

Biaya Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,  
Tahun Anggaran 2002

**PUSAT PENELITIAN SOSIAL BUDAYA  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : **KONFLIK LOKAL PERCIKAN DISINTEGRASI NASIONAL: Studi Kasus Tawuran Antar-kampung di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.**
- b. Bidang Ilmu : Sosial
- c. Kategori Penelitian : II (Pemecahan masalah pembangunan)
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap dan gelar : Drs. Agus Maladi Irianto, MA
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. Gol/ Pangkat dan NIP : III D/ Penata TK I/131 672 469
  - d. Jabatan fungsional : Lektor Madya
  - e. Jabatan struktural : -
  - f. Fakultas/ Jurusan : Puslit Sosial Budaya
3. Jumlah anggota peneliti : 2 (dua) orang
  - a. Nama anggota peneliti I : Drs. Mudjahirin Thohir, MA
  - b. Nama anggota peneliti II : Drs. Suharyo, M. Hum
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah
5. Lama penelitian : 8 bulan
6. Biaya yang diperlukan :
  - a. Sumber dari Depdiknas : Rp. 6.000.000
  - b. Sumber lain : -Jumlah : Rp. 6.000.000  
(Enam juta rupiah)

Semarang, Oktober 2002

Mengetahui  
Ketua Puslit Sosbud  
Lemlit UNDIP



**Prof. Dr. A.M. Djuliaty Suroyo**  
NIP 130 516 885

Ketua Peneliti



**Drs. Agus Maladi Irianto, MA**  
NIP 131 672 469

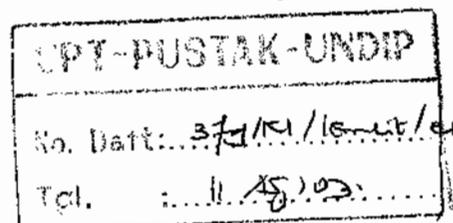


Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

**Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto**  
NIP 130 529 454

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tinjauan Pustaka .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kontribusi Penelitian .....	11
F. Metodologi .....	11
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KONFLIK .....	17
A. Lokasi, lingkungan alam, dan tingkat kepadatan penduduk ...	17
B. Mata Pencaharian .....	20
C. Tingkat Pendidikan, Agama, dan Aspirasi Politik .....	25
BAB III. ANALISIS STRUKTUR KONFLIK .....	30
A. Sinopsis Kekerasan Sosial .....	30
B. Desain Panggung Kekerasan Sosial .....	32
C. Skenario Kekerasan Sosial .....	41
BAB IV. KESIMPULAN .....	50
Daftar Pustaka .....	52



## RINGKASAN

### KONFLIK LOKAL PERCIKAN DISENTEGRASI NASIONAL : STUDI KASUS TAWURAN ANTARKAMPUNG DI KABUPATEN TEGAL

Oleh

Agus Maladi Irianto, Mudjahirin Thohir, Suharyo

Pusat Penelitian Sosial Budaya, Universitas Diponegoro

Tahun 2002, 53 halaman

SPK No. 01891/LIT/BPPK-SDM/TV/2002

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah kekerasan sosial yang diekspresikan dalam bentuk tawuran antarkampung di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu hal yang dicari jawabnya adalah : akar permasalahannya, motivasi, sasaran, dan tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat tawuran. Di samping itu, digali pula kelompok-kelompok penggerak dan jaringan-jaringan kerjanya serta dampak sosial psikologis masyarakat yang menjadi sasaran tawuran.

Sumber data diperoleh dalam tiga tahap. Pertama, mengkaji pemberitaan-pemberitaan kekerasan sosial, khususnya tawuran yang dimuat di media massa. Kedua, melakukan pengamatan di daerah konflik. Ketiga, melakukan wawancara mendalam dengan teknik *Snowball* terhadap subjek penelitian (masyarakat awam, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi sosial dan aparat keamanan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sebagai akar permasalahan yang utama, terutama persaingan dalam mengakses hasil hutan. Hutan di mata mereka dipersepsi dalam dua sisi (a) terpaksa menjarah dan (b) merasa memiliki. Dari sini lalu muncul ungkapan "jika mereka maling (aparat/orang lain), mengapa kita tidak ikut maling juga". Akibat persepsi tersebut, mereka melakukan kekerasan sosial dengan kesadaran resiko yang akan dihadapi, yaitu dipukul, ditahan, atau dipenjara. Oleh sebab itulah, *itu* sebagai bentuk "latihan" menghadapi hal-hal tersebut. Sebagai akibat dari keterancaman dan resiko yang pasti dihadapi, berkembanglah sikap curiga pada pihak lain/orang lain, sehingga muncullah perilaku sosial *konco* atau *seteru* sebagai ciri *wong alasan*. Hal ini pada gilirannya melahirkan segregasi sosial. Tawuran ini juga memunculkan rasa dendam baik bagi pelaku atau masyarakat yang menjadi sasaran amuk massa.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya rehabilitasi baik fisik maupun psikologis. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi perasaan sedih, frustrasi, dan sikap balas dendam.

## SUMMARY

### THE LOCAL CONFLICT AS A REFLECTION OF THE NATIONAL DISINTEGRATION: A CASE STUDY OF INTERVILLAGE AMOK IN TEGAL REGENCY

By

Agus Maladi Irianto, Mudjahirin Thohir, and Suharyo

The Research Center for Social and Cultural Affairs

Year 2002, 55 pages

SPK NO. 01891/LIT/BPPK-SDM/IV/2002

The research studies social riots as expressed in the form of inter-village amok 'tawuran' in Tegal Regency. The study tries to find out the factors, motives, and target of the people involved in a such amok. This research also tries to identify the motivators and their networks and its psychological and social impacts on the society.

The data are obtained in three steps. First, the data are obtained through the news analysis on social riots, especially in mass media. Second, they are obtained through observation in the conflict area, and the last, using snowball technique, the data are obtained through interview with the subjects of this research including common people, formal leaders, leaders of religions, leaders of social organization, and leaders of local army and police.

The result shows that economic factor is the main source of all social riots, especially the competition to have an access on forest products. For them, forest can have two different values, possession or something to robe. There is a saying 'If they can robe the forest products, why cannot we'. Due to this perception, they commit social riots with their own risks such as being kicked, arrested, or even being imprisoned. Therefore, alcoholic rink 'ciu' is perceived as a 'practice' to face the risks. As a result of this, a suspicion among the society has developed and therefore the social attitude called friend or enemy 'konco' or 'seteru' as the characteristics of brutal people 'wong alasan'. This, in turn, will create social segregation and cause the society to become the target of the amok to take a revenge.

It is suggested that physical or psychological rehabilitation be given to them in order to eliminate sad, frustrated and revenge feelings.

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar belakang**

Konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antarindividu atau kelompok yang sama-sama mereka inginkan. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan seolah menjadi tujuan utama bagi mereka. Berbeda dengan persiapan atau kompetisi yang memiliki tujuan utama: pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi. Tujuan untuk memenangkan sesuatu kadangkala tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan (bandingkan pada Suparlan, 1999, 7-19).

Jawa Tengah meskipun tergolong dalam satu kesatuan kebudayaan Jawa, namun sebagai kesatuan wilayah ia menunjukkan wilayah yang majemuk. Didorong oleh pemekaran wilayah, dan perkembangan masing-masing kota yang merupakan konsekuensi dari dinamika sosial suatu wilayah itulah, maka masalah kemajemukan di Jawa Tengah tak bisa terhindari. Kemajemukan itu terjadi, baik menyangkut latar belakang agama, golongan sosial, maupun kemajemukan yang disebabkan penyebaran etnik selain Jawa. Apakah dengan adanya kemajemukan kemudian melahirkan konflik sosial?

Kemajemukan tersebut pada dasarnya hanya menjadi salah satu indikasi terciptanya konflik sosial masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, konflik sosial akan melatarbelakangi terganggunya kenyamanan perasaan, pikiran, dan tindakan setiap individu dalam rangka berinteraksi dengan sesama di lingkungan masyarakat. Atau dengan kata lain, konflik sosial merupakan perluasan dari konflik individual, yang umumnya terwujud dalam bentuk konflik fisik, dan biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang

Jika konflik sosial melahirkan ketidaknyamanan perasaan, pikiran, dan tindakan setiap individu dalam rangka berinteraksi, maka pengertian konflik lebih cenderung diasumsikan secara negatif. Akan tetapi konflik bisa diasumsikan secara netral. Artinya, konflik adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan, biasanya kekuatan-kekuatan tersebut bersumber pada keinginan manusia atau masyarakat.

Konflik sosial yang kemudian diekspresikan dalam bentuk kekerasan sosial, akhir-akhir ini mudah terjadi di berbagai daerah. Salah satu di antaranya yang terjadi di Kabupaten Tegal pertengahan tahun 2000 lalu. Peristiwa yang terjadi pada bulan Juli tahun 2000 lalu, secara sepintas terlihat sebagai sebuah peristiwa spontan dan tergolong jenis kriminalitas biasa. Akan tetapi, peristiwa perseteruan antara dua desa yang bertetangga, yakni antara warga Dukuh Randu Desa Harjosari dan warga Desa Karangmalang, Kecamatan Suradadi yang ternyata membawa korban jiwa dan terbakarnya ratusan rumah warga itu perlu mendapat kajian lebih jernih lagi.

Atau dengan kata lain, ekspresi kekerasan sosial yang melibatkan banyak pihak yang terkait di dalamnya pada dasarnya bisa bertolak dari persoalan yang tak direncanakan (*unplanned violence*) dan juga bertolak dari suatu perencanaan (*planned violence*) jangka panjang yang jelas sasarannya.

Secara garis besar munculnya tindakan kekerasan disebabkan dua hal, yakni prakondisi dan tipologi. Prakondisi bisa mengarah pada timbulnya kekerasan karena adanya masalah-masalah internal dan peristiwa-peristiwa eksternal. Masalah internal bisa menyangkut pada tabrakan-tabrakan kepentingan antar individu pada satuan sosial, baik dalam rangka penguasaan jabatan, fasilitas, maupun perebutan sumber daya lingkungan yang tersedia. Individu yang terlibat konflik mencoba mempresentasikan kepentingan kelompok yang lebih luas untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang mereka lakukan (Irianto., 1999).

Kekerasan sosial tanpa direncanakan, adalah suatu bentuk kekerasan sosial yang kemunculannya bisa bersifat spontan, bersifat lokal, dan kurang atau tidak adanya target-target tertentu kecuali kebutuhan untuk mengekspresikan kekerasan itu sendiri. Sedangkan kekerasan sosial direncanakan, meskipun melibatkan orang daerah atau pelakunya orang setempat, tetapi secara sistematis telah diperhitungkan nilai untung ruginya.

Para penggerak terhadap munculnya kekerasan sosial yang direncanakan umumnya telah mempertimbangkan keuntungan-keuntungan secara sepihak dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, dalam kekerasan sosial yang direncanakan, tindak kekerasan sosial itu umumnya

ditempatkan sebagai suatu strategi. Sebagai suatu strategi, maka tindak kekerasan sosial merupakan suatu pilihan.

Strategi pemilihan tindak kekerasan sosial, dapat dilihat pula ke dalam beberapa asumsi. *Pertama*, bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan, memang telah dan sedang terjadi persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber daya alam maupun sumber-sumber daya lingkungan. Sumber-sumber daya alam umumnya berkaitan dengan masalah sumber-sumber ekonomi<sup>1</sup>, sedang sumber-sumber daya lingkungan, bisa menyangkut perebutan sumber-sumber atau posisi-posisi strategis, baik dalam pengertian sosial maupun politik. Sumber-sumber daya alam atau lingkungan yahak, sehingga muncul persaingan baik terselubung atau terbuka.

Jika bukan karena sumber daya alam dan lingkungan yang terbatas, maka masyarakat manusia sendiri yang tidak memiliki batasan kepuasan terhadap apa yang telah didapatkan. Kalau yang terjadi demikian, maka kelompok-kelompok lain akan dinilai sebagai suatu ancaman.

*Kedua*, pilihan terhadap bentuk kekerasan sosial dalam rangka memperebutkan sumber daya alam maupun sumber daya lingkungan itu merupakan suatu manifestasi dari kemampuan individu atau kolektif yang terlibat ke dalamnya, yaitu bahwa mereka baru bisa memperebutkan persaingan ke dalam bentuk seperti itu<sup>2</sup>.

*Ketiga*, adanya kelompok tertentu yang berlatar belakang politik tertentu, maupun kelompok status quo yang menghendaki timbulnya konflik sosial dengan kekerasan untuk mendiskreditkan pemerintahan reformis, sehingga memungkinkan mereka bisa memperoleh posisi strategis kembali.

Atas dasar penalaran tersebut di atas, kekerasan sosial dapat dilihat sebagai hal yang hajar dan tidak wajar. Kewajaran di sini menyangkut pada

---

<sup>1</sup> Persaingan-persaingan itu, dalam satu sisi, menciptakan sistem penguasaan, tetapi pada sisi lain, sebagai akibat dari sistem penguasaan itu, akan terjadi aksi perlawanan. Persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi dalam satu segi adalah positif karena dapat mendorong pihak-pihak yang bersaing untuk meningkatkan sumber-sumber daya atau potensi yang dimiliki. Tetapi pada segi lain adalah negatif ketika cara-cara untuk memperebutkannya itu tidak melalui aturan main (*rule of the game*) yang jelas apalagi kalau terjadi distorsi atau pendistorsian baik lewat kebijakan-kebijakan politik maupun praktik-praktik yang tidak bermoral dan eksploitasi, seperti yang banyak terjadi dalam banyak tempat dan peristiwa pada masa akhir pemerintahan orde baru.

<sup>2</sup> Kekerasan sosial dapat mengambil berbagai bentuk dan media, yaitu lisan, tulisan, maupun bentuk fisik. Dalam bentuk lisan seperti hujatan, pelecehan. Media yang digunakan bisa tidak mempunyai bentuk (*amorf*) seperti rumor, fitnah, dsb. Tetapi bisa mempunyai bentuk seperti lukisan, kartun, dsb.

penjelasan akal sehat kita yaitu bahwa setiap orang atau setiap kelompok masyarakat, sebetulnya berada dalam situasi konflik.

Menjadi tidak wajar oleh karena alasan etika sosial dan kemanusiaan. Alasan etika sosial karena manusia Indonesia termasuk masyarakat daerah Tegal, pada dasarnya dibangun dan diharapkan menjadi manusia yang memiliki toleransi, mudah memaafkan, dan bisa hidup secara damai dengan sesama. Alasan kemanusiaan karena pada dasarnya setiap terjadinya konflik sosial dengan kekerasan akan berakibat semakin menyengsarakan rakyat bawah.

Atas dasar etika sosial, kemanusiaan, dan kepentingan terhadap perlunya dijaga dan dikukuhkannya persatuan dan kesatuan nasional itulah, maka diperlukan suatu solusi bagi masyarakat yang sedang berkonflik ke arah solusi damai. Untuk dapat mengarahkan kepada solusi damai terhadap masyarakat daerah Tegal yang sedang berkonflik, perlu lebih dahulu dipelajari secara cermat akar permasalahannya, kelompok-kelompok yang terlibat kekerasan, motivasi dan tujuan dari tindak kekerasan dimaksud.

## **B. Perumusan Masalah**

Menyimak peristiwa tersebut bisa jadi tergolong dalam kategori konflik lokal, namun bila secara masif terjadi korban jiwa dan terbakarnya ratusan rumah maka ia tidak bisa dianggap sebagai peristiwa sederhana. Ia akan menjadi percikan potensial yang bakal mewarnai gambaran desintegrasi di Jawa Tengah ini.

Untuk itu, yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mungkin warga yang sudah bertahun-tahun hidup bertetangga ternyata terlibat konflik yang kemudian merugikan harta dan jiwa?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya perlu diajukan hipotesis sebagai berikut. *Pertama*, konflik lokal terjadi karena ada perebutan sumber daya ekonomi di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Jika terjadi konflik akibat adanya sumber daya ekonomi yang diperebutkan, maka di antara mereka yang berkonflik telah terjadi pelanggaran aturan main yang bisa jadi telah mereka sepakati. Pelanggaran aturan main tersebut mungkin tidak secara langsung menjadi perseteruan di antara mereka, tetapi karena akumulasi-nya semakin lama maka konflik pun tak bisa dihindari (lihat Irianto., 1999). Jika

ekspresisi konflik tersebut merupakan akumulasi dendam yang telah cukup lama, maka di antara pihak yang berkonflik sebenarnya ada asset atau tujuan yang sedang diperebutkan (dikompertisikan).

*Kedua*, konflik terjadi tidak semata-mata oleh perebutan sumber daya ekonomi, melainkan karena berbagai aspek yang dalam masyarakat lazim disebut sebagai organisasi sosial. Jika konflik diakibatkan berbagai aspek dalam organisasi sosial, maka organisasi tersebut menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada kepada warganya secara tidak merata. Jika organisasi menyajikan pendistribusi kekuatan yang tidak merata sosial, maka besar kecilnya kekuasaan dalam organisasi sosial menentukan kekuatan yang mereka dapatkan (bandingkan pada Dahrendorf, 1959).

### C. Tinjauan Pustaka

Dalam pemikiran *konseptual*, suatu kekerasan sosial akan cenderung muncul karena dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, adanya prakondisi dan tipologi. Prakondisi yang bisa mengarah kepada timbulnya kekerasan bisa karena adanya masalah-masalah internal dan adanya peristiwa-peristiwa eksternal. Masalah internal menyangkut pada tabrakan-tabrakan kepentingan antar individu pada satuan sosialnya berupa kepentingan penguasaan jabatan, fasilitas, atau sumber-sumber ekonomi di antara mereka sendiri terutama dikalangan elite. Individu-individu yang terlibat konflik itu berikutnya merepresentasikan kepentingan kelompok yang lebih luas (lihat Irianto, 1999)

Untuk mengesahkan konflik dan keputusan tindakan kekerasan, kelompok yang bertikai itu cenderung mengesahkan lewat legalitas-legalitas hukum atau sara. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan tadi lebih diartikan sebagai model pemecahan permasalahan secara pragmatis atau sebagai tindakan "pencegahan" kerusakan kendati pun dalam prasangka-prasangka yang diciptakan sendiri. (bandingkan dengan Johan Galtung, 1996 dan John Paul Lederach, 1997).

Masalah internal, boleh jadi bersifat kebetulan, seperti misalnya tertumpahnya minyak olie (milik etnis Tionghoa yang berperan sebagai juragan) yang dilakukan oleh seorang buruh (etnis Jawa). Masalah peristiwa eksternal, menyangkut peristiwa (konflik) di luar satuan-satuan sosialnya tetapi karena

peristiwa itu ditafsirkan sebagai konflik sara, maka ia mudah dijadikan alasan untuk modus pembalasan.

Prakondisi itu akan mendapatkan lahan yang subur ketika bertemu dengan tiga hal, yaitu (a) corak kepribadian masyarakatnya yang mudah marah. Masyarakat Negarigung dan Pasisiran diduga masuk pada kategori ini, karena (b) di dalam kedua masyarakat itu, muatan kepentingan persaingan kekuasaan maupun persaingan ekonomi relatif menonjol. Corak perjalanan kedua masyarakat ini dapat dilihat dari latarbelakang kesejarahan kerusuhan dan kekerasan sosial di Jawa masa lalunya (bandingkan pada Koentjaraningrat, 1984).

Di luar pemikiran konseptual, adalah perwujudan kekerasan sosial itu sendiri. Tindakan kekerasan sosial di sini dapat dilihat ke dalam dua aspek, yaitu (a) sifat, dan (b) ekspresi. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan sosial kalau ia menunjukkan sifatnya, yaitu bersifat massal atau kolektif. Bersifat massal kalau tindakan itu tidak diatasmamakan kelompok tertentu, tetapi bersifat umum.

Sedangkan menyangkut sejumlah konflik lokal yang terjadi di Jawa Tengah beberapa peneliti terdahulu telah mencoba mengkaji, namun dari kajian-kajian tersebut ternyata hanya sebatas temuan awal yang di antara mereka masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Artinya, temuan-temuan awal sebagaimana temuan Darmanto Jatman dan Andriani S. Soemantri (1998), Agus Maladi Irianto (1998), Novel Ali dan Agus Ali (1998), Nurdien H. Kistanto (1998), Mudjahirin Thohir (1998) dan Tjetjep R. Rohidi (1998), merupakan temuan yang penting untuk bisa dikembangkan, dikritisi, dan dikaji lebih mendalam sambil dilakukan *recek* dan penyempurnaan.<sup>4</sup>

Darmanto Jatman dan Andriani Sumampouw Soemantri (1998) telah meneliti masalah kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di Solo (Mei 1998) dengan menekankan pada gambaran kognisi masyarakat terhadap makna kekerasan itu sendiri. Dalam kognisi masyarakat Solo, kekerasan sosial itu

---

<sup>4</sup> Penelitian Darmanto Jatman dan Andriani Sumampouw "Kerusuhan dan Penjarahan di Jawa Tengah: Kasus Solo Mei 1998" (1998), penelitian Agus Maladi Irianto berjudul "Penjarahan Kayu Jari di Hutan Randu Blatung, Bloro" (1998), Novel Ali dan Agus Ali berjudul "Tawuran Antarpending Desa di Jawa Tengah: Kasus Brebes dan Pati" (1998), Nurdien HK berjudul "Sembako" Massa Beringas: Kerusuhan Sosial di Kotamadia Dati II Pekalongan Menjejang Pemilu 1997" (1998), Mudjahirin Thohir "Isue Ingon Kethek Ireng dan Tindakan Pengadilan Massa: Kasus Desa Rowosari Semarang Jawa Tengah" (1998) dan "Isue Santet dan Tindakan Pengadilan Massa: Kasus Desa Donorojo Demak" (1998). Tjetjep R. Rohidi "Kerusuhan Sosial: Geger Kebumen Tanggal 7 dan 8 September 1998" (1998).

dianggapnya bukan hal baru. Kekerasan sosial ternyata sudah dikenali secara baik oleh masyarakat Sala setidaknya-tidaknya mulai pada tahun 1911.

Temuan Darmanto dan Andriani (1998), nampaknya perlu dikaji lebih lanjut dan lebih kritis. Pertama, bahwa apa yang ditemukan oleh kedua peneliti itu barulah temuan awal, baik dari segi frekuensi peristiwa maupun yang melatarbelakangi timbulnya peristiwa itu. Kajian lebih lanjut dimungkinkan ditemukan kerusuhan-kerusuhan lain dengan corak yang lebih variatif. Dengan begitu akan lebih ditemukan tipologi kekerasan sosial yang pernah terjadi di Solo. Kedua, hasil penelitian itu belum juga menjelaskan bagaimana di antara elit penguasa bermain untuk memperebutkan atau mempertahankan jabatan strategis. Jika kerusuhan sosial dalam konteks tertentu memberi keuntungan bagi elit politik (penguasa), maka bagaimana mereka bermain, dan siapa harus mengambil peran apa dalam rangka mengantisipasi atau membuat toleransi dalam kerusuhan dimaksud atau bahkan mengeksploitasinya. Dengan kata lain, patut dipertanyakan keuntungan-keuntungan maupun kerugian-kerugian di balik kerusuhan-kerusuhan itu bagi kelompok-kelompok sosial tertentu, baik dalam konteks pemaknaan konflik horizontal dan konflik vertikal. Penelitian lanjutan yang akan kami lakukan, mencoba melihat kerusuhan dan kekerasan sosial dalam konteks wilayah kebudayaan Negarigung. Benarkan bahwa kerusuhan sosial juga bisa menjadi pilihan model bagi elite-elite tertentu dalam kerangka menghadapi atau menguasai dan menekan pesaing-pesaingnya? Jika benar bahwa memang ada kerusuhan dan kekerasan yang dijadikan pilihan model bagi elite tertentu, maka apakah model itu diikuti oleh rakyat atau ada tipologi tersendiri dari kerusuhan dan kekerasan yang beruang lingkup pertengkar antara rakyat dengan rakyat?

Pada penelitian Agus Maladi Irianto (1998) terhadap masyarakat "Kalang" yaitu masyarakat Blora, perihal "penjarahan kayu jati di hutan Randu Blatung, Blora", ditemukan simpulan antara lain "penjarahan itu terjadi karena adanya anggapan masyarakat setempat bahwa menjarah kayu bukanlah mencuri, karena dalam kognisi mereka, hutan dan isinya adalah juga menjadi bagian dari milik nenek moyang mereka. Meskipun begitu, pengambilan kayu-kayu jati di hutan itu secara moral haruslah berada dalam kadar secukupnya. Tidak boleh mengambil lebih dari yang diperlukan". Yang menarik dari temuan Agus Maladi

ini ialah konflik atau kerusuhan sosial itu terjadi justru ketika terjadi "ketidakadilan" dalam kaitannya dengan "pengambilan jumlah kayu" itu sendiri termasuk sanksi yang diberikan penguasa kepada rakyat.

Pertanyaan lebih lanjut yang belum digali oleh penelitian Agus Maladi ini antara lain ialah: perkembangan pemaknaan mengambil (*amek*) kayu jati, antara konsep mengambil miliknya (nenek moyangnya) dan mencuri (milik pemerintah); perkembangan konsep "kelestarian lingkungan" dalam kaitannya dengan "penjarahan secara besar-besaran". Apakah tindakan demikian dilatarbelakangi oleh tidak berlakunya lagi nilai-nilai tradisional atau justru dilatarbelakangi oleh tindakan-tindakan sejumlah aparat kehutanan sendiri yang dinilai telah melunturkan kepentingan menjaga kelestarian hutan? Jika nilai-nilai tradisional seperti yang tercermin pada konsep *amek* itu telah luntur, apakah kelunturan nilai-nilai itu karena ketidakmampuannya masyarakat setempat dalam menjaga "penjarahan" yang justru dilakukan oleh mereka yang mengaku lebih "berkuasa" sehingga ketika rakyat ikut menjarah bermakna sebagai sikap frustrasi? Hal-hal demikian menjadi sangat penting dicari jawabannya kalau kita ingin mengkonstruksi kognisi mereka mengenai penjarahan dan kekerasan.

Novel Ali dan Agus Ali (1998) yang meneliti masalah tawuran massal di daerah Pati dan Brebes (Jawa Tengah), menemukan perbedaan pola dan penyebab di antara dua daerah itu. Menurut Novel Ali dan Agus Ali (1998), tawuran di Brebes sudah dianggap sebagai tradisi. Jika dianggap sebagai tradisi, tentu saja perlu ditanyakan secara kritis, yakni apakah konsep "tradisi" yang digunakan oleh kedua peneliti itu pengertiannya "sudah terbiasa", atau karena adanya nilai-nilai yang selalu ingin ditegakkan? Jika hanya karena sudah terbiasa, maka temuan itu cenderung reduktif (terlalu menyederhanakan persoalan). Tetapi jika karena ada nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh masing-masing yang bertikai, mestinya perlu diperdalam ke arah persepsi diri dan kelompok lain. Prejudice atau label apa yang sampai bisa menggugah "semangat" untuk setiap saat melakukan "tawuran".

Tradisi tawuran itu menurut kedua peneliti ini "terpelihara" karena temperamen warga setempat, bertemperamental tinggi, di samping ada kebiasaan minum-minuman keras. Apakah kebiasaan minum minuman keras yang menyebabkan mereka menjadi bertemperamental tinggi, atau karena

bertemperamental tinggi sehingga mereka menyukai minuman keras? Indikator apa yang menyebabkan kedua peneliti itu berkesimpulan "penduduk bertemperamental" dan seberapa jauh pengertian "suka minuman keras" ternyata tidak dijelaskannya.

Kedua peneliti itu juga menyimpulkan bahwa tawuran yang terjadi di daerah Pati dan di daerah Brebes, tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik dan ekonomi. Nampaknya kedua peneliti ini tidak tertarik menangkap nilai-nilai esensial masyarakat yang dipedomani bersama di antara kelompok yang bertikai, termasuk nilai-nilai kejantanan, keberanian, dan bagaimana berlakunya nilai-nilai itu secara operasional ketika mereka dihadapkan oleh persaingan-persaingan. Jawaban terhadap persoalan ini akan memberi pemahaman baru mengenai konsepsi politik dan ekonomi dalam lingkup kedaerahan. Temuan bahwa tawuran hanya terjadi di antara pemuda penganggur dan peminum-minuman keras, adalah temuan pada tataran permukaan. Di balik itu, menjadi menarik untuk dipahami lebih lanjut konsep menganggur dan bekerja dalam kaitannya dengan tawuran.

Pertanyaan yang layak digali lebih lanjut adalah: apakah tawuran itu bercorak spontanitas, atau justru sebaliknya, kejadian itu adalah akumulasi berbagai persoalan yang tersumbat sehingga tawuran dipilih sebagai model penyelesaian untuk mengurangi ketegangan-ketegangan psikologis di antara kedua kelompok yang bertikai itu? Atau apakah tidak mungkin di balik tawuran itu, terdapat pihak yang diuntungkan? Jika ada pihak yang diuntungkan, dan mereka sadar terhadap hal itu, mengapa pihak yang diuntungkan lebih memilih modus "tawuran" bukan kepada "kerjasama"?

Nurdien H. Kistanto (1998) yang meneliti masyarakat pesisiran yaitu masyarakat Pekalongan dalam kasus "Sembako" (Semangat Membakar Toko) menyimpulkan bahwa kerusuhan itu terjadi karena antara lain arogansi pejabat pemerintah terhadap rakyat dalam rangka memenangkan partai Golkar pada Pemilu 1997 lalu. Pada tataran empirik, istilah "arogansi pejabat pemerintah" sebagai pemicu munculnya kerusuhan di kota Pekalongan, memang dapat dipahami. Tetapi penyederhanaan penyimpulan demikian ini berkesan sebagai temuan jurnalistik, sebab sebagaimana dikemukakan pada bagian latar-belakang di atas, kerusuhan dan kekerasan sosial sangat boleh jadi merupakan

model-model penyelesaian persaingan. Oleh karena itu, penelitian lanjut yang akan kami lakukan pada masyarakat Pekalongan dan Jepara, yang bisa jadi mereka sebetulnya bertolak pada orientasi kebudayaan Negarigung yaitu kekuasaan pemerintahan, atau persaingan ekonomi rakyat dan penguasa dalam kebudayaan pesisiran.

Persaingan prestise dan ekonomi di kalangan rakyat ternyata terbukti pada kasus kerusakan sosial di desa Rowosari Semarang yang dibalut oleh issue *Ingon Kethek Ireng*. Dalam kerusakan itu, yang bermain adalah antara rakyat dengan rakyat oleh akibat persaingan memperebutkan sumber daya ekonomi. Kekerasan sosial pada kasus ini -- sebagaimana diteliti oleh Mudjahirin Thohir (1998) terjadi karena dua alasan yang saling bersinggungan yang berakar pada belum siapnya masyarakat menerima "persaingan". H. Dardiri, dalam satu segi, ingin mendapat tempat yang "prestiseus" sebagaimana dia membayangkan model "pejabat" yang dapat menguasai dan menakuti rakyatnya, sedang di sisi lain -- terutama setelah era reformasi -- rakyat merasa "muak" kepada orang yang berpandangan dan bertingkah laku seperti itu. Yang membangkitkan amarah rakyat adalah H. Dardiri justru menggunakan simbol-simbol kekayaan dan kekuasaan (menjadi ketua LKMD) untuk menakut-nakuti rakyat. Ketika kekayaan yang telah dimilikinya dikukuhkan sebagai akibat dari hubungannya dengan "seorang dukun" dan peliharaan "kethek ireng", sementara peliharaan "kethek ireng" itu diyakini oleh rakyat bahwa pemeliharaan "makhluk" itu pasti akan mencelakakan orang lain, yang disebutnya sebagai "tumbal", maka setelah terjadi tiga warga yang mati secara berturut-turut -- diyakini sebagai akibat tumbal itu -- emosi rakyat setempat menjadi tidak terkendali. Sebagai sasarannya adalah diri H. Dardiri atau harta miliknya untuk dirusak secara massal. Ungkapan "giliran siapa lagi yang harus meninggal", merupakan suatu ekspresi kekhawatiran rakyat secara riil terhadap keberadaan H. Dardiri. Dalam konteks ini, kekerasan sosial yang terjadi pada kasus ini dapat dilihat sebagai "sebelum dibunuh harus membunuh, sebelum dicelakakan harus mencelakakannya".

## D. Tujuan Penelitian

*Pertama* merekonstruksi pemahaman mendasar tentang kekerasan sosial dalam kebudayaan atau akar kebudayaan masyarakat yang berkonflik secara sosiohistorik.

*Kedua*, mengkaji daerah yang bersangkutan dilihat sebagai representasi kategori wilayah kebudayaan, baik menyangkut corak dominan, konfigurasi, maupun varian-variannya.

*Ketiga*, dapat menjelaskan fenomena budaya kekerasan sosial dalam konteks kebudayaan atau bukan pada tataran empiriknya.

*Keempat*, dapat memberi salah satu solusi terhadap munculnya aksi kekerasan yang merebak akhir-akhir ini di Jawa Tengah.

## E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi pada pemecahan masalah pembangunan, terutama menyangkut beberapa hal sebagai berikut: (1) merekonstruksi pemahaman mendasar tentang kekerasan sosial dalam kebudayaan atau akar kebudayaan Jawa secara sosiohistorik, (2) mendeskripsikan wilayah konflik sebagai representasi kategori wilayah kebudayaan, baik menyangkut corak dominan, konfigurasi antara Jawa pedalaman dan pesisiran, maupun varian-variannya, (3) menjelaskan fenomena budaya kekerasan sosial dalam konteks kebudayaan atau bukan pada tataran empiriknya, serta (4) dari penelitian ini diharapkan bisa memberi salah satu pemecahan dan sekaligus memberi solusi tentang munculnya aksi kekerasan yang merebak akhir-akhir ini di Indonesia pada umumnya, dan di Jawa Tengah pada khususnya.

## F. Metodologi

### F.1. Pendekatan

Untuk menjelaskan fenomena sosial – terutama menyangkut kerusuhan sosial di Kabupaten Tegal – dalam penelitian ini akan menggunakan model pendekatan yang dikembangkan oleh Ervin Goffman (1976) yang lazim disebut sebagai "teori panggung" (*the stage art theory*). Goffman memperkenalkan suatu model penjelasan terhadap suatu peristiwa dengan istilah *impression*

*management* dengan bertolak pada *stage art model explanation*. Yakni sebuah pengamatan terhadap ekspresi fenomena sosial seperti layaknya kita menonton pertunjukan drama di atas panggung.

Sejalan dengan pendekatan Goffman tersebut, maka yang perlu dicermati dalam penelitian ini secara garis besar menyangkut tiga unsur utama – seperti layaknya pertunjukan drama. Ketiga unsur utama tersebut meliputi: latar (*setting*), para pemeran (*actors*), dan alur peristiwa (*plot*).

Latar dalam pertunjukan drama – mengacu pada pendekatan Goffman (1976)- menyangkut panggung yang menjadi “arena pertunjukan” atau “arena bermain”. Latar dalam hal ini bisa berarti panggung secara fisik maupun panggung dalam arti latar belakang sosial budaya. Panggung sebagai latar fisik, pada dasarnya dibagi menjadi tiga unsur, yakni panggung depan (*front stage*) yang secara formal dijadikan arena permainan, panggung belakang (*back stage*) yang secara informal justru melatarbelakangi konsep pengadeganan, dan tempat penonton (*audience*) yang secara langsung tidak terlibat dalam peristiwa pertunjukan.

Panggung depan dalam kasus kerusuhan sosial di Tegal secara formal bisa kita identifikasikan sebagai tempat, pelaku, waktu peristiwa berlangsung. Pengamatan pada panggung depan, kemungkinan yang kita bisa lihat kapan, siapa, dimana, dan bagaimana peristiwa kekerasan sosial itu berlangsung. Akan tetapi, menyangkut latarbelakang dan motivasi peristiwa pembunuhan dan munculnya aksi pembakaran rumah perlu diamati dari latar panggung belakang, Proses yang melatarbelakangi kekerasan sosial yang tidak terlihat dari wilayah *audience*, tetapi bisa diperhatikan dari panggung belakang.

Sementara wilayah *audience* yang merupakan wilayah semestinya tidak terlibat langsung terhadap “proses pertunjukan”, dalam mengamati fenomena sosial pada dasarnya dapat kita interpretasikan sebagai stimulus intensitas “pertunjukan”. Sebagai misal, tepuk tangan penonton akibat dari simpati terhadap adegan dan karakter tokoh, adalah bagian tak terpisahkan menciptakan stimulus intensitas sebuah pertunjukan drama. Kalau saja kita identifikasikan bahwa “tepu tangan” tersebut sebagai bentuk fenomena sosial, maka suasana euforia di sejumlah tempat akibat dari globalisasi informasi yang

diekspresikan dengan pembakaran bahkan pembunuhan, adalah stimulus bagi warga pelaku konflik melakukan kekerasan sosial.

Lebih dari itu, gambaran latar kekerasan sosial di Kabupaten Tegal pada dasarnya tidak hanya sebatas pengamatan terhadap panggung secara fisik, dalam pengamatan fenomena sosial kita juga akan melihat panggung sebagai latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya inilah yang kemudian melingkari posisi panggung secara fisik. Artinya, peristiwa kerusuhan sosial tersebut pada dasarnya juga dilatarbelakangi oleh lingkungan sosial budaya masyarakatnya.

Sementara itu selain latar (*setting*) unsur lain dalam drama adalah tentang para pemeran (*actors*). Pemeran dinamika sosial tidak hanya yang tampak di atas panggung depan (*front stage*), tetapi para pemeran yang ada di panggung belakang (*back stage*) juga bagian yang tak terpisahkan menentukan "adegan pertunjukan". Mereka yang di panggung belakang, seperti sutradara (*director*), dan penulis skenario.

Dalam setiap "pertunjukan" yang cenderung tampak biasanya para pemeran hanya yang terlihat di atas panggung atau panggung depan. Dalam kasus kekerasan di Tegal misalnya, mereka yang dianggap pemeran kekerasan kemungkinan hanya mereka yang bertindak sebagai pembunuh atau pembakar rumah. Akan tetapi, berperan (*character*) sebagai pembunuh atau pembakar rumah, kemungkinan hanya sekadar menerima tugas (*casting*) yang diberikan sutradara. Sementara sutradara mengatur adegan bersama sesuai dengan skenario yang ditetapkan oleh penulis skenario.

Dengan demikian dalam hal pemeranan terdapat *flow* hierarkis, sejak dari penulis skenario "pertunjukan", kemudian diinterpretasikan oleh sutradara, seterusnya sutradara memberi *casting* kepada pemeran di panggung (*actors*) untuk memerankan karakter berdasarkan interpretasi sutradara. Seorang pemeran di panggung hanya sebagai mediator ekspresi dari penulis skenario berdasarkan interpretasi sutradara.

Bertolak dari kenyataan struktur hierarkis tersebut, pada dasarnya secara politis seorang penulis skenario mempunyai posisi teratas, sementara pemeran di panggung berada dalam posisi terbawah. Bila dikembangkan lebih jauh, seorang penulis skenario jauh lebih leluasa menentukan dinamika konflik cerita,

sementara pemeran di panggung hanya sekadar menjadi penyampai konflik yang siapa tahu mereka tak paham benar ide, gagasan, substansi konflik tersebut. Lalu pada struktur mana sebenarnya mempunyai posisi strategis menentukan dinamika konflik?

Seorang penulis skenario secara struktural semestinya mempunyai posisi strategis dan prestisus dalam memerankan peran sentral dalam politik pertunjukan drama, akan tetapi ia tak mungkin terlibat langsung dalam pemberian dan pembagian peran terhadap para pemeran panggung (*actors*). Demikian pula *actors* bisa dengan jelas terlihat peran dan *actingnya* di atas panggung, tetapi mereka tak mempunyai kualifikasi moral menentukan skenario. *Actors* bisa saja berperan sebagai orang atau tokoh lain, tetapi hanya sebatas pemeran dan penyampai dialog yang kemungkinan tak memahami substansi cerita atau lakon tersebut. Yang paling strategis justru posisi sutradara, ia berada pada lapis tengah yang didukung oleh penata kostum, penata musik, penata cahaya, serta penata artistik yang lain, lebih leluasa berkomunikasi dengan penulis skenario dan berhak menentukan *casting* yang sekaligus mengatur penampilan *actors*.

Sutradara meskipun secara struktural di bawah posisi penulis skenario, namun ia lebih strategis, baik dalam menginterpretasikan keinginan penulis skenario maupun menentukan permainan para pemeran panggung (*actors*). Kestrategisan, itu juga didukung oleh beberapa unsur yang posisinya setara dengan sutradara – seperti penata musik, penata kostum, penata cahaya, dan penata artistik lainnya – tetapi secara politis tidak mempunyai kekuasaan terhadap *actors*.

Dengan demikian pengertian pemeran dalam hal ini tidak hanya dibatasi para pelaku pembunuhan dan pembakaran rumah semata, tetapi investigasi yang perlu dikembangkan adalah siapa yang menjadi sutradara dan penulis skenario “pertunjukan” kekerasan sosial di Kabupaten Tegal ini.

Lebih dari itu, kalau kekerasan sosial yang terjadi di Tegal bisa diinterpretasikan lebih jauh ternyata para pemeran di panggung belakang ini jauh lebih variatif dibandingkan para pemeran di panggung depan. Masing-masing pemeran kekerasan sosial tidak hanya yang terlihat pada wilayah panggung tetapi kernungkinan besar mereka menjadi pemeran sesuai dengan

status sosial mereka. Artinya, pemeran yang secara formal berkonflik di panggung depan sebagai pembunuh dan pembakar rumah, kemungkinan besar mereka juga menjadi pemeran untuk mempertahankan status sosial mereka. Yang menjadi pertanyaan, adalah bagaimana para pemeran di panggung belakang tersebut kemudian menentukan *casting* terhadap pemeran di panggung depan demi mempertahankan status sosial mereka?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan pengkajian terhadap unsur ketiga dari idiom panggung, yakni alur peristiwa (*plot*). Yang dimaksud dengan alur peristiwa dalam hal ini tidak hanya terbatas pada sambung sinambung peristiwa semata, namun ia lebih jauh menyangkut proses terciptanya "pertunjukan drama". Aksi kekerasan sosial yang terjadi di Tegal pada dasarnya bukan sebuah peristiwa spontan, ia terjadi akibat dari suatu proses interaksi sosial "antar para pemeran" yang dibatasi oleh ruang dan waktu dalam *setting* sosial masyarakat.<sup>5</sup> Pertimbangan ruang dan waktu itulah yang kemudian menandai penentuan waktu (*timing*) aksi kekerasan sosial terjadi.

Maka sejalan dengan aksi kekerasan sosial di Tegal, tentunya tidak bisa dilihat secara sepotong-sepotong. Seperti halnya sebuah pertunjukan drama panggung, ia merupakan "kerja" kolektif yang dilatarbelakangi hubungan antar unsur (teknis, politis, dan kultural).

## H.2. Proses Pengumpulan dan Analisis Data

Kajian mengenai budaya kekerasan sosial ini akan dilakukan pada masyarakat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah -- khususnya yang terlibat dalam ranah konflik tersebut. Observasi, wawancara dan FGD (*Focus Group Discussion*). Semuanya dipilih berdasarkan pada konteks permasalahan. Ketiga metode itu (observasi, wawancara, dan curah pikir) dilakukan oleh peneliti sendiri. Hal ini perlu ditekankan karena instrumen dalam penelitian kualitatif adalah penelitiannya itu sendiri, bukan sekadar kuesener.

---

<sup>5</sup> Dalam adegan drama sering dikenal pola sadar ruang dan sadar waktu. Artinya setiap tingkah laku (*acting*) di atas panggung harus menjadi satu kesatuan aktivitas yang memerlukan ketepatan waktu (*timing*) dan ketepatan ruang (*spacing*). Kapan dan di mana suatu adegan harus diperankan memberi batasan yang tegas dalam sebuah pertunjukan di panggung.

Observasi, wawancara, dan FGD -- pada proses awal di lapangan, bertolak dari asumsi-asumsi teoritis. Namun pada langkah-langkah berikutnya, ketiga metode itu harus dikembangkan sesuai dengan temuan-temuan lapangan. Untuk melihat dan menggali lebih lanjut temuan-temuan itu, selama di lapangan -- tim peneliti akan melakukan dua pekerjaan yang saling terkait.

*Pertama*, mengumpulkan data sesuai dengan metode yang dianggap paling cocok terhadap permasalahan dan informan; dan *kedua*, mendiskusikan kembali bersama tim. Sedangkan tahap analisis data akan digunakan model analisis kebudayaan., yakni analisis yang lebih mengutamakan penjelasan secara kategorial dan bukan berhenti pada dukungan angka-angka.